

BAB III

STATUS PEREMPUAN PARTAI POLITIK DPW PKB JAWA TIMUR

A. PKB dalam Lintasan Sejarah

Setelah hampir tiga puluh dua (32) tahun, era tinggal landas pembangunan yang ditetapkan Orde Baru terpaksa kandas di tengah jalan ketika badai krisis ekonomi dan moneter menerjang kawasan Asia pada Juli tahun 1997. Di Indonesia, peristiwa tersebut membawa dampak pada goyangnya tonggak pembangunan ekonomi yang dipancangkan penguasa Orde Baru. Kemudian krisis mata uang regional tersebut berujung pada kisruh politik, ekonomi dan keamanan yang sangat hebat bagi Indonesia. Dan pada gilirannya, legitimasi Orde Baru dari sisi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik pun setahap demi setahap sirna.

Muara dari segala petaka tersebut berujung pada tuntutan rakyat perihal pergantian pucuk pimpinan nasional. Mantan Presiden Suharto beserta para punggawanya tak kuasa membendung hantaman gelombang demonstrasi dari kalangan kampus dan non-kampus yang mendesak dirinya agar sesegera mungkin meletakkan mandatnya sebagai Presiden. Tuntutan reformasi politik berkembang dalam eskalasi krisis politik yang menunjukkan kekuatan reformasi dan tidak mungkin bisa dibendung lagi. Akhirnya, tepat pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto pun bersedia menanggalkan jabatannya sebagai orang nomer satu di Republik Indonesia. Dengan demikian, Indonesia

memasuki suatu era transisi dari sistem pemerintahan otoriter ke suatu sistem yang lebih demokratis.¹

Tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru meniupkan angin segar perubahan, yang kemudian mendobrak sekat-sekat tiranik yang selama ini mengurung bangsa Indonesia. Demokratisasi menjadi senandung syahdu yang diperdengarkan pada setiap bilik-bilik rakyat di negeri ini. Momentum kejatuhan Soeharto menjadi sebuah pemantik yang dahsyat bagi demokrasi, hal inilah yang kemudian mendorong segenap warga Nahdliyin berinisiatif mengadakan diskusi dan halaqah politik yang intensif dalam kerangka menyongsong perubahan tersebut.

Pertemuan-pertemuan tersebut membicarakan bagaimana seharusnya peran warga NU yang telah lama termarginalisasi dalam arus perubahan yang tengah bergerak akseleratif nyaris tak terkendali itu. Berbagai masukan, desakan dan ragam interpretasi pun bermunculan menyikapi situasi politik nasional yang sarat dengan ketidakpastian. Arah pembicaraan pun kemudian semakin mengkristal pada sebuah pilihan, yaitu tentang perlunya warga NU memiliki suatu wadah untuk menampung aspirasi politiknya.² Dalam konteks ini sebagian besar warga NU menginginkan pada masa-masa mendatang terjadinya sebuah pengambilalihan kekuasaan secara konstitusional dan demokratis melalui perpanjangan tangan politik yang berbentuk partai politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi politik mengingat sebagian besar warga negara Indonesia merupakan warga Nahdhatul 'Ulama.

¹ Max Lane, Bangsa Yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto (Jakarta: Reform Institute, 2007), h. 193.

² Wawancara, Anisa Sakura, Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur, 1 juni 2016.

Namun demikian, dalam merespon wacana yang mengemuka di tengah-tengah penganutnya, PBNNU bertindak hati-hati dan tidak gegabah dalam menentukan sikap politiknya agar tidak berakibat tidak baik bagi pengikutnya. Kehati-hatian sikap para pengurus PBNNU terjadi karena ada satu konsensus bersama yang tidak boleh dilanggar oleh NU secara institusional. Di mana pada Muktamar ke-27 di Situbondo, NU secara organisasional menetapkan tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dan diputuskan kembali kepada khittah 1926.⁷⁶ Menyaksikan sikap para pimpinan teras PBNNU tersebut, kemudian memicu kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan internal kaum santri itu, khususnya pada tataran akar rumput.³

Menyikapi kondisi sosial dan realitas politik yang sedang berlangsung saat itu, PBNU tidak dapat menutup mata dan mengabaikan desakan yang begitu deras yang mengarah kepada PBNU. Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, K.H. M. Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. K.H. Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), H.M. Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad

³ Wawancara, Anisa Sakur, Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur, 1 juni 2016.

Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.⁴

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H. Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H. Abdul Aziz, M.A., Drs. H. Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H. Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhamimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk partai politik baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26-28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.⁵ Hal penting yang dinyatakan dalam

⁴ Nadhif Alawi (ed.,), Partai Kebangkitan Bangsa dan Pemilu 2004: Kesiapan PKB Menjelang pemilu2004, (Jakarta: Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat PKB, 2003), h. 3.

⁵ Alawi (ed.), Partai Kebangkitan Bangsa dan Pemilu 2004 (Jakarta: Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat PKB, 2003), h. 4.

pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, antara lain adalah tentang perlunya kehidupan yang lebih demokratis dan dikembalikannya kedaulatan kepada rakyat.

Mabda' Siyasi antara lain memuat visi, misi dan strategi partai politik.

Hubungan partai politik dengan NU memuat hubungan historis, kultural dan aspiratif antara NU dengan parpol bentukannya. Sedangkan struktur dan lambang parpol dimuat dalam rancangan AD/ART.⁶ Setelah melalui perdebatan yang panjang dan melelahkan, akhirnya saat-saat yang bersejarah sekaligus dinanti-nantikan oleh segenap warga NU pun tiba, karena tepat pada tanggal 23 Juli 1998 pukul 15:00 WIB dideklarasikanlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kediaman K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ciganjur, Jakarta Selatan.⁷ Pucuk pimpinan PKB untuk kali pertama disematkan kepada Matori Abdul Djalil sebagai Ketua Umum PKB.

Dalam Anggaran Dasar PKB dicantumkan bahwa tujuan PKB adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin, materi-spiritual, dan mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, bersih dan terbuka, dan berakhhlakul karimah.⁸

Terpilihnya nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menurut Gus Dur adalah karena “Kebangkitan Bangsa” merupakan pilihan yang paling

⁶ A. Effendy Choirie, PKB Politik Jalan Tengah NU (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002), h.186-187.

⁷ Para deklarator tersebut adalah K.H. M. Ilyas Ruchiyat, K.H. Munasir Ali, K.H. Mustofa Bisri, K.H. Muchith Muzadi, dan K.H. Abdurrahman Wahid.

⁸ Bahrul 'Ulum, "Bodohnya NU" apa "NU dibodohi" (Yogyakarta: Ar-Ruz Press, 2002), h. 135.

tepat. Karena kata “Kebangkitan” adalah terjemahan dari kata nahdah dalam Nahdlatul Ulama, karena memang dari dahulu ulama NU menginginkan “kebangkitan bangsa”. Selain itu, kata “bangsa” sudah inheren dengan kehidupan kebangsaan Indonesia dan masuk dalam lubuk hati warga NU.⁹ Dikarenakan negara Indonesia yang sangat heterogenitas, terutama dari dimensi agama. Oleh karena itu, jika partai yang akan didirikan memakai kata “umat”, maka konotasinya hanya umat Islam, sementara umat yang di luar Islam tidak masuk. Akan tetapi jika memakai kata “bangsa”, maka di sana tidak hanya orang Islam tetapi orang di luar Islam juga termasuk di dalamnya. Kemudian dalam perjalannya, terdapat beberapa orang yang beragama non muslim dalam kepengurusan PKB. Dengan demikian telah lahir sebuah partai politik yang mewadahi komunitas nahdhiyin sekaligus menandakan era baru bagi bangkitnya peran politik NU yang sejak lama terpinggirkan oleh tamaknya kekuasaan. PKB diharapkan mampu membawa aspirasi politik warga NU khususnya dan umumnya bangsa Indonesia dalam mengarungi terjalnya jalan kehidupan.¹⁰

Sejalan dengan komitmen untuk membangun tatanan politik demokrasi maka demokrasi harus dimaknai sebagai *code of conduct* dalam mengelola kehidupan politik. Salah satu karakter demokrasi adalah terbukanya ruang untuk berbeda pemikiran, pendapat atau sikap. Situasi tersebut memang dapat memunculkan konflik, namun hal itu bukan sesuatu yang tabu dalam demokrasi. Dalam kerangka itu, konflik menjadi bagian dari

⁹ Wawancara, Aida Fitriati Anggota Perempuan Bangsa Jawa Timur, 13 Juli 2016.

¹⁰ Ibid., Aida Fitriati Anggota Perempuan Bangsa Jawa Timur, 13 Juli 2016.

proses untuk memperoleh hasil terbaik dengan memaksimalkan beragam potensi yang dimiliki para anggota organisasi. Namun, konflik akan menjadi hal yang kontraproduktif jika lebih banyak didorong oleh kepentingan pragmatis, jangka pendek dan kepentingan sesaat lainnya. Dalam sisi ini, konflik justru membuat organisasi menjadi kerdil dan tidak berkembang. Energi para aktivisnya akan lebih banyak tersita untuk menyelesaikan konflik yang tidak pernah kunjung usai. Konflik internal partai politik bukan sesuatu yang baru dalam sejarah kepartaian di Indonesia. Kompetisi yang ketat dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan menjadi bagian dari konflik. Setidaknya, ada tiga elemen kekuasaan yaitu: authority, influence dan force yang menjadi media atau ruang konflik.¹¹ Kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan di antara individu atau aktor politik dapat menjadi pemicu konflik. Hampir semua konflik internal partai berawal dari pertarungan dalam perebutan kepemimpinan dalam partai. Imbas konflik itu selalu membawa perubahan kepengurusan tandingan. Konflik internal PKB menjadi bagian dari hal tersebut, di mana dalam perjalannya Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah lepas dari persoalan konflik internal PKB. Partai Kebangkitan Bangsa dapat dikatakan dalam proses transformasi kepemimpinan internal partai nyaris tidak pernah berlangsung secara normal dan damai. Diawali dari perpecahan yang terjadi antara Matori Abdul Djamil selaku Ketua Umum PKB dengan Abdurrahman Wahid yang menganggap

¹¹ Wawancara, Khofidah Anggota Perempuan Bangsa Jawa Timur, 20 Juli 2016.

Matori telah berkhianat kepada dirinya.¹² yang diberhentikan oleh Gus Dur dalam Muktamar Luar Biasa di Yogyakarta pada 2002, MLB ini kemudian memilih Alwi Shihab sebagai pimpinan teranyar PKB versi MLB Yogyakarta.

Ternyata konflik dengan internal PKB pada era Matori Abdul Djalil bukanlah konflik yang pertama dan terakhir, karena setelah persitiwa tersebut serentetan perpecahan terus melanda bahtera Partai Kebangkitan Bangsa. Pasca konflik dengan Matori Gus Dur kembali “pecah kongsi” dengan Alwi Shihab, yang kemudian mendirikan PKNU bersama sejumlah Kyai Langitan. PKB seperti telah ditakdirkan untuk berkembang dalam situasi konflik internal, karena awan kelam konflik kembali menaungi PKB dalam Muktamar II di Semarang 2005. Kali ini yang menjadi sasaran tembak adalah kubu Choirul Anam yang menyusun struktur kepengurusan sendiri, di mana yang Ketua Dewan Syuro adalah K.H. Abdurahman Chudlori dan Ketua Dewan Tanfidz dijabat Drs. Choirul Anam. Sedangkan sebagai lawannya adalah Drs.Muhaimin Iskandar, M.Si sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syuro. Namun seperti telah diduga bahwa konflik ini kembali dimenangkan kubu Gus Dur.¹³

¹² Matori di sinyalir mendukung pemberhentian Gus Dur sebagai presiden RI ketika terjadi gejolak politik kekuasaan di parlemen pada tahun 2001. Gonjang-ganjang politik nasional waktu itu menaikkan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur, dan Matori di tuduh telah membelot ke kubu Megawati. Alasan inilah yang memicu konflik internal PKB untuk pertama kali.

¹³ Putusan Kasasi MA No. 02/K/Parpol/2006 Tanggal 7 September 2006 yang mengukuhkan Putusan PN Jakarta Selatan No. 1445/PDT.G/2005/PN.JAKSEL, tanggal 5 Juni 2006 merupakan keputusan final yang secara tegas menyatakan bahwa PKB yang sah di mata hukum, aturan perundangan dan kepartaian adalah PKB dibawah kepengurusan KH Abdurrahman Wahid dan Drs. Muhammin Iskandar, MSi. Putusan hukum itu kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) No. M.14-UM.06.08 Tahun 2006 tanggal 11

Di saat-saat semua partai politik tertuju pada perhelatan akbar pemilu yang akan digelar paruh pertama 2009, PKB kembali harus menelan pil pahit politik yang disebabkan oleh dualisme kepemimpinan. Krisis yang menerpa PKB kali ini melibatkan Gus Dur dengan Muhamain Iskandar. Muhamin dipecat oleh Rapat Pleno PKB yang dihadiri Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro tertanggal 26 Maret 2008. Pemecatan ini berakibat fatal bagi keberlangsungan soliditas PKB, karena ada kepengurusan ganda yang masih mengklaim bahwa partainya lah yang paling sah. Dan di luar dugaan, karena PKB kubu Gus Dur dikalahkan melalui proses hukum. Akhirnya Gus Dur pun harus gigit jari, karena PKB-nya tidak diperbolehkan mengikuti pemilu, sedangkan PKB kubu Muhamin dimenangkan untuk mengikuti pesta demokrasi 2009.

B. Profil Singkat Perempuan Bangsa PKB Jawa Timur

DPW PKB Jawa Timur berlokasi di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur di alamat Jl. Ketintang Madya 153 - 155 Surabaya, DPW PKB Jawa Timur diketuai oleh Bapak H. Halim Iskandar,M.si dan sekretaris nya H. Thoriqul Haq,M.ML, DPW PKB Jawa Timur memiliki Cabang di Kota-kota yang ada di Jawa Timur, hamper di seluruh kota yang ada di Jawa Timur terdapat Cabang dari DPW PKB.

DPW PKB Jatim mempunyai peran yang sangat penting di dunia perpolitikkan yang ada di Jawa Timur khususnya, pada Pemilihan Umum

September 2006 yang berisi pencabutan SK Menkumham No M-11.UM.06.08 Tahun 2005 tentang pendaftaran DPP PKB dibawah kepemimpinan Ketua Dewan Syuro KH Abdurahman Chudlori dan Ketua Dewan Tanfidz Drs. Choirul Anam.

yang dilaksanakan pada tahun 2014 PKB Jawa Timur mendapatkan kursi sejumlah PKB menjadi partai 'pemenang' pemilu legislatif (pileg) 2014 tingkat Provinsi Jawa Timur. Dari pengumuman yang disampaikan KPU Jatim, suara PKB tertinggi dengan memperoleh 19,10 persen dan mendapatkan 20 kursi. Dimana dari 20 kursi tadi diisi oleh 13 kader putra dan 7 kader putri.¹⁴

Melihat potensi perempuan di PKB yang cukup signifikan, maka diupayakan berdiri satu badan Otonom yang berfungsi sebagai wadah perempuan dalam menyuarakan pendapatnya baik secara sosial maupun politik. Wadah tersebut diberi nama dengan PEREMPUAN BANGSA (PBPKB).

Perempuan Bangsa (PB) adalah barisan perempuan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan salah satu organisasi sayap pkb yang konsen terhadap perempuan baik dalam bidang politik, sosial, budaya dan agama. Kehadiran organisasi sayap perempuan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas terutama kalangan perempuan. Sebagai mahluk feminis, perempuan kerap menjadi salah satu objek dari ketidak adilan gender di berbagai hal dalam kehidupan nyata.¹⁵

Perempuan Bangsa merupakan women wings atau sayap politik Partai Kebangkitan Bangsa unsur perempuan yang dibentuk sebagai media untuk menggalang dukungan politik, meningkatkan kapasitas politik , meningkatkan

¹⁴ Wawancara, Aufa Nadiroh Staff Ahli (Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur), 09 Juli 2016.

¹⁵ <http://pkb.or.id/perempuan-bangsa-harus-jadi-motor-penyelesaian-permasalahan-perempuan-indonesia#sthash.VIySs1rJ.dpuf>

partisipasi politik perempuan, serta melaksanakan kebijakan partai sebagaimana dimandatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan demikian, Perempuan Bangsa memiliki peran strategis dalam pemenangan pemilu mengingat jumlah pemilih perempuan yang demikian besar.¹⁶

Dengan demikian, maka Visi Perempuan Bangsa adalah meningkatnya kapasitas dan keterwakilan perempuan di struktur partai, parlemen, dan eksekutif secara nasional untuk tercapainya kemaslahatan masyarakat khususnya masyarakat perempuan. Sedangkan misinya adalah:

1. Memperjuangkan kesetaraan gender khususnya hak-hak perempuan;
 2. Memperkuat posisi PKB sebagai partai politik yang memiliki keperpihakan terhadap perempuan;
 3. Memperkuat kapasitas partisipasi politik perempuan;
 4. Mendistribusikan peran politik perempuan dalam struktur partai, parlemen, pemerintah serta jabatan publik lainnya;

Perempuan Bangsa memiliki banyak kegiatan. Selain itu juga dibentuk dengan semangat kebangsaan yang memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Yaitu:

- a. Organisasi tingkat Pusat dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP;
 - b. Organisasi tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah disingkat DPW;

¹⁶ PD/PRT PEREMPUAN BANGSA 2016

- c. Organisasi tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang disingkat DPC;
 - d. Organisasi tingkat Kecamatan dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang disingkat DPAC;
 - e. Organisasi tingkat Desa/Kelurahan dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting;
 - f. Organisasi tingkat Dusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting;
 - g. Organisasi yang berlokasi di Luar Negeri dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang Istimewa.

C. Karakteristik dan Arah Perjuangan Perempuan Bangsa PKB Jawa Timur

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah aspirasi dan perjuangan karakter dan garis perjuangan tempat di mana Partai ini dilahirkan. Sebagai Jam'iyyah Diniyyah yang berkewajiban amar ma'rūf nah munkar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik secara pribadi maupun kelompok, NU tidak dapat mengelak tanggung jawab dalam berperan serta membangun kehidupan politik bangsa Indonesia yang adil, demokratis dan berakhhlak mulia di atas landasan-landasan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Melihat kekhasan gerakan PKB di atas. Maka Perempuan Bangsa harus diakui memiliki ciri khas dan arah perjuangan yang jelas. Memasuki

periode 2014-2019 jika merujuk pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),¹⁷ Indonesia sudah memasuki fase konsolidasi demokrasi. Pertama, secara kelembagaan ditandai adanya berbagai lembaga negara (DPR, MPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, MA, MK, BPK, dll) yang menjalankan kekuasaan pemerintahan negara secara chek and balances sebagaimana dijamin oleh konstitusi UUD 1945.¹⁸

Kedua konsolidasi demokrasi ditandai pula secara prosedural adanya penyelenggaraan Pemilu 2014 yang dilakukan dengan sistem proporsional terbuka yaitu perhitungan suara dilakukan berbasis kuota suara habis di daerah pemilihan, kemudian calon legislatif yang terpilih berdasarkan suara terbanyak. Memang dalam menggunakan sistem proporsional terbuka, di satu sisi menguntungkan partai karena kecenderungan semua caleg bekerja untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, namun disisi lain terjadi kompetisi antara caleg dalam internal partai politik maupun antar caleg yang mengarah pada konflik horisontal. Terdapat fenomena pula dengan sistem proporsional terbuka memungkinkan kader-kader berkualitas dan loyal justru terpental oleh pendatang baru yang memiliki popularitas, dan modal finance yang sehingga mampu melakukan pendekatan kepada rakyat pemilih dengan berbagai cara. Sistem ini juga berpotensi memperkuat praktek politik berbiaya tinggi dan mendorong caleg untuk berkompetisi dengan cara mengandalkan publikasi dibandingkan kerja politik berbasis kerja nyata.

¹⁷ UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

¹⁸ UUD 1945

Ketiga, konsolidasi demokrasi ditandai pula oleh kekuatan masyarakat sipil (civil society) dalam mengawal proses demokrasi dalam tiga fungsi utama, yakni advokasi, empowerment dan social control, yang menunjang terciptanya kematangan sistem demokrasi.¹⁹

Kemapanan mencapai konsolidasi demokrasi ditentukan pula oleh kematangan dan soliditas Partai Politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pilar demokrasi. Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki paduan nilai perjuangan antara basis keagamaan (sekarang mengembangkan politik rahmatan lil'almiin) dan basis nasionalisme dengan meneguhkan diri secara final berlandaskan pada asas Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhennika Tunggal Ika, menjadikan PKB sebagai partai alternatif yang mendapat respon positif dari berbagai pluralitas potensi yang ada. Sikap, pandangan dan kebijakan PKB yang sangat akomodatif terhadap paradigma baru antara lain pengarusutamaan gender yang harus memberi warna di setiap kebijakan pembangunan, nampaknya telah direalisasikan dalam bentuk kebijakan yang adil dan setara.

Beberapa regulasi yang menjadi ikon karena kedekatannya dengan kebutuhan rakyat dan konstituen PKB, yaitu UU Pangan dan UU Desa menjadi perhatian utama bagi PKB dan seluruh perangkatnya. UU Pangan yang mengamanatkan adanya kedaulatan dan kemandirian pangan harus dikawal agar mencerminkan perspektif keadilan gender, khususnya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan atas pangan.

¹⁹ Novi Christiastuti Adiputri, *tiga peran civil society dalam proses demokrasi*, artikel, dimuat dalam detiknews, 8/11/2012

Mengingat situasi perempuan yang merupakan pengelola pangan, masih kesulitan mengakses hak atas pangan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. Karenanya pada tingkat implementasi UU Pangan harus memberikan jaminan perlindungan perempuan diberbagai bidang kehidupan.

Demikian pula UU desa harus benar-benar di kawal agar efektivitas program berbasis desa tercapai. Tujuan UU Desa yang ingin membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan harus mendapat perhatian dari segi pengawasan implementasi dari UU tersebut serta memperhatikan leterwakilan perempuan sebagai anggota Badan Musyawarah Desa (BPD).

PKB juga telah mengejawantahkan amanat UU Partai Politik maupun UU Pemilu untuk menempatkan potensi kader perempuan menduduki jabatan struktural di Parrtai Politik, maupun mendistribusikan kader potensial untuk menjadi calon anggota legislatif secara proporsional pada pemilu 2014. Berbagai kebijakan PKB secara umum yang terkait dengan rekruemenn potensi kader perempuan tentu tidak menafikan ragam kontribusi pemikiran dari perangkat atau badan otonom yang memiliki segmen kaum perempuan yaitu Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa.

Baik sebagai sayap organisasi perempuan PKB, sebagai media perjuangan perempuan PKB, maupun entitas organisasi sosial kemasyarakatan, Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks sebagai banom perempuan PKB bertugas menjalankan misi perjuangan PKB khususnya pada segmen masyarakat tertentu, dalam hal ini adalah kelompok masyarakat perempuan. Dalam konteks sebagai entitas organisasi sosial kemasyarakatan tentu concern dengan kerja-kerja pemberdayaan perempuan yang masih tertinggal di berbagai kehidupan : pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sebagai media perjuangan perempuan yang berhimpun di PKB menjadi sarana untuk melakukan mobilitas struktural dalam rangka mendistribusikan sumberdaya kekuasan semata-mata yang diniatkan untuk kemaslahatan ummat.

Guna merumuskan berbagai gagasan baru yang menjadi mandate PKB maupun tanggungjawab moral sebagai institusi, maka dalam kesempatan Musyawarah Nasional III Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa bermaksud merumuskan garis-garis besar program kerja nasional.

Selain itu, untuk mempermudah merumuskan garis-garis besar program nasional Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa maka perlu diketengahkan analisa SWOT sebagai alat untuk melihat kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) keberadaan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa.

1. Kekuatan

Dari segi kekuatan, Pergerakan Perempuan Bangsa memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- a. Memiliki segmen garapan yang jelas yaitu kaum perempuan. Secara populatif jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki demikian halnya dari segi jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki. Dari segi jumlah tentu menjadi kekuatan secara teoritik mempermudah mencari sumber rekrutmen caleg perempuan maupun untuk mendongkrak suara PKB.
 - b. Dari segi loyalitas, kesetiaan dan konsistensi Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa merupakan badan otonom PKB yang setia, istiqomah akan arah dan kebijakan PKB, Pergerakan Perempuan kebangkitan Bansga belum pernah memicu munculnya konflik yang secara structural maupun horizontal mempengaruhi eksistensi PKB.
 - c. Isu kesetaraan dan keadilan gender merupakan issu mondial merupakan kekuatan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa. Konsep keseatraan dan keadilan gender yang harus terpenuhi dalam prinsip demokrasi mendapat dukungan luas (modial) dari kalangan masyarakat sipil kemudian dibreakdown ke berbagai payung hukum sehingga lahir kebijakan *affirmative action* (kuota 30%) keterwakilan perempuan di berbagai bidang pembangunan dapat terapkan.

2. Kelemahan

Dari segi kelemahan Perempuan Bangsa dapat dinalisa sebagai berikut:

- a. Lambannya penyelengaraan kaderisasi, padahal kader merupakan organ yang sangat vital dalam organisasi yang mau dan mampu mewakafkan pikiran, tenaga moral maun material untuk mempertahankan dan mengembangkan keberadaan organisasi. Sesungguhyu dengan konsistensi melakukan kaderisasi PKB tidak kesulitan mencari stock SDM untuk rekruemen caleg maupun yang akan diidistribusikan di berbagai tempat strategis baik didalam maupun diluar Partai. Dengan kaderisasi pula akan melahirkan kepemimpinan yang tidak instan dan mumpuni secara leadership.
- b. Manajemen organisasi perlu diperbaiki. Roda organisasi sesungguhnya terletak pada bagaimana sistem manajemen itu berfungsi. Mengingat Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa secara politis terkena imbas oleh dinamika internal yang terjadi di PKB maka sempat terjadi kevacuuman dalam hal kepengurusan di berbagai tingkatan rentang waktu 2007-2010, sehingga secara manajerial harus memulai kembali dari awal.
- c. Lemahnya SDM perempuan sehingga memperngaruhi posisi tawar dan secara kuantitatif tidak banyak yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan partai, serta distribusi peran yang tidak setara. Meskipun secara konseptual, gagasan dan visi besarnya PKB telah dapat dikategorikan sebagai sebuah partai yang pro-gender equity, namun dalam praktek politiknya PKB masih didominasi oleh struktur dan kultur sosial politik yang kurang menghargai kesetaraan gender.

3. Peluang

Dari segi peluang Perempuan Bangsa terdapat beberapa peluang, yang diantaranya:

- a. Konstitusi yang menjamin segenap warga negara mendapat kebebasan berkumpul, berpendapat, berorganisasi dan menjamin hak-hak dasar dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Payung hukum adanya affirmative action (30%) keterwakilan perempuan sebagaimana tertuang dalam UU No,2 tahun 2011 tentang Parrai Politik, dan UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR,DPD dan DPRD.
 - b. Program - program Pemerintah yang dapat di sinergikan dengan kerja-kerja advokasi Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bansga.
 - c. Teknologi komunikasi yang makin canggih, sehingga merupakan peluang untuk mensosialisasikan visi,msi dan program ke berbagai binaan struktur organisasi maupun basis massa dan masyarakat luas

4. Tantangan

Pergerakan Perempuan Bangsa dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain:

- a. Munculnya problem kemasyarakatan yang masih berkelindan. Mengingat belum tercapainya target pembangunan millenium tahun 2015, dan meningkatnya budaya kekerasan (fisik, psikis maupun politis) yang secara spesifik menimpakan kaum perempuan, maka menjadi

tantangan bagi Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa melakukan kerja-kerja advokatif dalam hal pendampingan maupun memperkuat advokasi di bidang regulasi. Dengan demikian akan memulihkan kepercayaan masyarakat akan fungsi-fungsi keberadaan Partai Politik.

- b. Tantangan untuk melahirkan kepemimpinan yang jujur, bersih dan bertanggungjawab. Problem beratnya menciptakan good governance, salahsatunya dengan cara menghentikan segala praktik korupsi menjadi tantangan bagi kepemimpinan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang terutama yang telah mendapat mandat rakyat baik sebagai legislative, dan eksekutif untuk mempelopori terciptanya Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN).

c. Keputusan MK tentang pemilu serentak tahun 2019. Meskipun masih memunculkan debatable dan banyak penafsiran atas putusan MK mengani pemilu serentak tahun 2019,namun bagi Peregerakan Perempuan Kebangkitan Bansga harus menyiapkan resources atas konstalasi politik yang akan terjadi pada tahun 2019. Terutama menyiapkan potensi kader perempuan untuk terlibat di bagian strategis dalam perjalanan Partai Kebangkitan Bangsa dimasa -masa yang akan datang.²⁰

D. Kontribusi Kader Perempuan Bangsa PKB Jawa Timur

²⁰ AD/ART PKB hasil Mukatmar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta, 2-4 Mei 2008

Kontribusi kader Guna memperoleh dukungan suara atas calon kepala daerah kota dan kabupaten dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak se-Jawa Timur (Jatim), pada Desember 2015, Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Bangsa (DPW PB) Jatim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk Kader Penggerak Partai (KPP) hingga tingkat desa. Strategi ini dilakukan agar calon gubernur (cagub), calon bupati (cabup), dan calon wali kota (cawali) yang diusung PKB dalam pilkada memperoleh dukungan rakyat setempat.

“Kami ingin mensolidkan suara perempuan, agar calon yang diusung PKB memenangkan pertarungan pilkada serentak” ujar Ketua DPW PB Jatim, Anisah Syakur, saat menyampaikan pesannya pada forum konsolidasi yang dihadiri Ketua Umum DPP PB Masrifah, Sekjen DPP PB Luluk Nur Hamidah, dan pengurus DPC PB kabupaten atau kota se-Jatim, di Wisma Sejahtera Ketintang, Surabaya.

Menurut Anisah, jumlah suara pemilih perempuan lebih besar daripada laki-laki. Di Provinsi Jatim tercatat ada 8.505 desa yang jika setiap desa memiliki minimal lima orang pengurus KPP, maka minimal sudah ada 42.525 kader votegater. Hal itu akan bekembang lebih besar dan berlipat ganda, karena setiap kader minimal memiliki anggota keluarga dan sanak famili.

PKB memperoleh kemenangan di sembilan daerah di pilkada 2011, karena di sana berhasil menempatkan kadernya duduk sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Ke-9 daerah tersebut adalah Blitar, Lamongan,

Situbondo, Trenggalek, Pasuruan, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi, dan Tuban.

E. Landasan Garis Garis Besar Program Kerja

Garis-garis besar Program kerja Pergerakan Perempuan kebangkitan Bangsa secara umum dan legal formal mengacu pada tujuan, dan usaha yang dikembangkan oleh PKB yaitu: PKB bertujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
 3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhhlakul karimah.

Untuk mencapai tujuannya, Partai melakukan usaha- usaha sebagai berikut:

- a. Bidang Agama: Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
 - b. Bidang Politik: Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri

yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera.

- c. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.
 - d. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.
 - e. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa; Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.
 - f. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.²¹

F. Orientasi Program Kerja Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa

²¹ PD/PRT Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa,hlm.177.

Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa jika memposisikan identitasnya sebagai banom PKB maka orientasi program kerja yang dikembangkan mengarah tujuan, usaha dan garis-garis program kerja nasional PKB antara lain:

1. Sebagai partai terbuka dan modern yang berusaha mewujudkan demokratisasi, penegakan hukum, dan penghargaan terhadap HAM serta menjunjung tinggi pluralitas. Dalam hal perjuangan di ranah politik mengedepankan sistem nilai dan moral dalam politik.
2. Sebagai partai advokatif senantiasa memperjuangkan hak-hak dasar warga negara secara adil dan setara termasuk memperkuat partisipasi politik perempuan diberbagai tingkatan.
3. Sebagai banom PKB berkewajiban menyiapkan kader-kader potensial untuk didistribusikan dijajaran kepengurusan partai maupun menyiapkan stock SDM perempuan untuk pemenuhan rekruitmen caleg perempuan PKB.
4. Sebagai banom PKB harus memamanej organisasi secara profesional, transparan dan akuntabel.
5. Memperkuat posisi PKB sebagai partai yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan kaum perempuan dengan merekrut dan mendidik kader-kader perempuan. Dalam konteks ini, Peregrakan Perempuan Kebangkitan Bangsa sebagai sayap perempuan PKB memiliki tanggung

jawab dan tugas untuk memperkuat citra politik PKB sebagai sebuah partai yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan perempuan.

Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa jika memposisikan sebagai media perjuangan perempuan PKB maka orientasi program kerja mengarah pada upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguanan kapasitas perempuan agar memiliki posisi tawar (bargaining position) baik internal internal PKB maupun di eksternal isntitusi diluar PKB.
 - b. Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa harus memberi warna proses demokrasi yang kian matang, dan beradab.
 - c. Menjadi organisasi politik yang berposisi sebagai badan otonom PKB yang mampu berperan sebagai penalur aspirasi perempuan dan aggregator bagi kepentingan perempuan.
 - d. Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa perlu memperkuat eksistensinya sebagai centre of excellent sekaligus *centre of movement* dalam proses perjuangan bagi perempuan.
 - e. Menjadi media aktualisasi diri dan pusat pengkaderan Politisi Perempuan. Sebagai media aktualisasi diri dan kaderisasi perempuan, PPKB dituntut untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam menyediakan ruang-ruang pemberdayaan, promosi dan distribusi kader-kader perempuan yang potensial.

Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa sebagai entitas organisasi sosial kemasyarakatan dituntut menyelesaikan berbagai masalah yang masih terjadi di tengah masyarakat seperti kemiskinan bagi kelompok masyarakat perempuan (perempuan kepala rumah tangga), Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial politik. Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa dituntut melakukan kerja-kerja advokatif yang mampu memproduksi gagasan dan strategi aksi perjuangan perempuan ,antara lain:

1. Mampu menjadi mediator antar dan bagi komunitas perempuan. Peran mediasi dan bridging antar komunitas perempuan saat ini masih belum banyak dilakukan oleh kelompok lain.
2. Mampu menjadi aggregator kepentingan perempuan. Dalam hal ini, Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menyerap, mengolah dan mengaksentuasikan problematika yang dihadapi oleh kaum perempuan dan merumuskannya ke dalam kebijakan-kebijakan strategis yang akan diperjuangkan oleh organisasi.
3. Mampu menjadi alat perjuangan bagi implementasi Kesetaraan gender dalam politik ekonomi sosial.
4. Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa harus mampu memainkan peran-peran strategis baik ke dalam maupun keluar dalam rangka meningkatkan posisi tawar politiknya sebagai jembatan untuk memperjuangkan perwujudan kesetaraan gender.

5. Memperjuangkan terwujudnya kesetaraan jender serta concern pada upaya pemenuhan kepentingan/hak perempuan. Gender equity yang berarti persamaan hak dan akses bagi perempuan dalam berbagai bidang ini sangat terkait dengan konstruksi social, ekonomi dan politik yang masih timpang. Sehingga, upaya memperjuangkannya wajib diwujudkan oleh Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa melalui berbagai program advokasi baik yan bersifat regulatif maupun pemberdayaan.²²

G. Visi, Misi dan Strategi

Visi Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yaitu 'Terwujudnya peningkatan keterwakilan perempuan di struktur partai, parlemen, dan eksekutif secara nasional untuk tercapainya kemaslahatan masyarakat khususnya perempuan melalui gender budgetting dan legislasi yang berperspektif perempuan dan Penyebaran organisasi secara nasional baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Adapun misi-misi Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa untuk mewujudkan visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan;
 2. Memperkuat posisi PKB sebagai partai politik yang memiliki keperpihakan terhadap perempuan;

²² PD/PRT Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa,hlm.169.

3. Memperkuat kapasitas partisipasi politik perempuan dan mempromosikannya dalam struktur partai, parlemen, pemerintah dan jabatan publik lainnya.

Strategis yang dikembangkan meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perempuan (*capacity building*) secara komprehensif;
 - b. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan organisasi perempuan;
 - c. Melakukan kaderisasi;
 - d. Memperkuat jaringan gerakan perempuan;
 - e. Membuka peluang program-program perempuan diwilayah perkotaan maupun dipedesaaan;
 - f. Melakukan advokasi kebijakan publik;
 - g. Melakukan *fund raising*.²³

H. Garis-Garsi Besar Program Kerja Perempuan Bangsa

1. Konsolidasi Pemikiran dan Ideologi

²³ Buku Panduan, *Perempuan Kebangkitan Bangsa*, hlm.17

Era global yang ditandai dengan gencarnya arus informasi dan canggihnya teknologi komunikasi menghadirkan berbagai implikasi.

Secara positif pilar terkecil anggota keluarga dalam rumah tangga dapat menjadi warga bangsa dunia yang dapat saling bertukar pengalaman misalnya mengenai penerapan prinsip demokrasi, kesetaraan gender, maupun membangun jaringan solidaritas kemanusiaan melalui dunia maya. Gencarnya arus informasi secara negative juga berimplikasi terhadap munculnya ideologi transnasional, munculnya gerakan separatis yang mengatasnamakan agama menjadi masalah serius bagi bangsa, bahkan akhir-akhir ini terdapat propaganda ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) sebagai organisasi radikal yang sangat tidak kontekstual dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhennika Tunggal Ika.

Secara Nasional Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa senantiasa membumikan nilai perjuangan PKB yang termaktub dalam Mabda' Siyasi PKB antara lain mencantumkan bahwa kekuasaan itu merupakan sarana untuk mendistribusikan sumberdaya demi kemaslahatan ummat. Kondisi obyketif masyarakat PKB terutama secara kultural warga Nahdliyyin masih mengalami ketertinggalan di segala bidang. Warga PKB yang 70% tinggal dipedesaan yang notabene matapencaharinnya sebagai petani, nelayan, dan buruh perkebunan sangat membutuhkan implemnetasi kebijakan yang berpihak pada mereka. Karenanya Pergerakan Perempuan keabngkitan Bangsa menselaraskan paradigma politik rahmatan lil'alamiin

yang dikembangkan oleh PKB agar kehadirannya memberi berkah ummat manusia, dan alam semesta. Berdasarkan kondisi actual dan obyektif tersebut di atas, maka Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa perlu merumuskan dan menjalankan program sebagai berikut:²⁴

1. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menguatkan pemahaman dan memantapkan proses kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai landasan kebangsaan RI yaitu Pancasila, UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhennika Tunggal Ika ke segenap lapisan masyarakat melalui kekuatan jaringan structural maupun jaringan kultural Perempuan Bangsa;
 2. Dalam konteks meneguhkan nilai perjuangan PKB yang dibidani oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), maka wajib mengembangkan prinsip perjuangan kebangaan *tasamuh* (toleran), *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), dan *I'tidal* (lurus) sehingga terbentuk identitas kepribadian dan kepemimpinan yang berakhlkul karimah dengan ciri-ciri *ash shidqu* (benar/jujur), *al amanah wal wafa bil ahdi* (dapat dipercaya dan menepati janji), *al adalah* (adil).
 3. Mensosialisasikan Keadilan dan Kesetaraan Gender sebagai konsep pembangunan yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam perencanaan, proses maupun sebagai pengambil keputusan strategis di berbagai bidang kehidupan.

²⁴ Lily Zakiyah Munir. Memposisikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam Prespektif Islam, hlm. 172 .

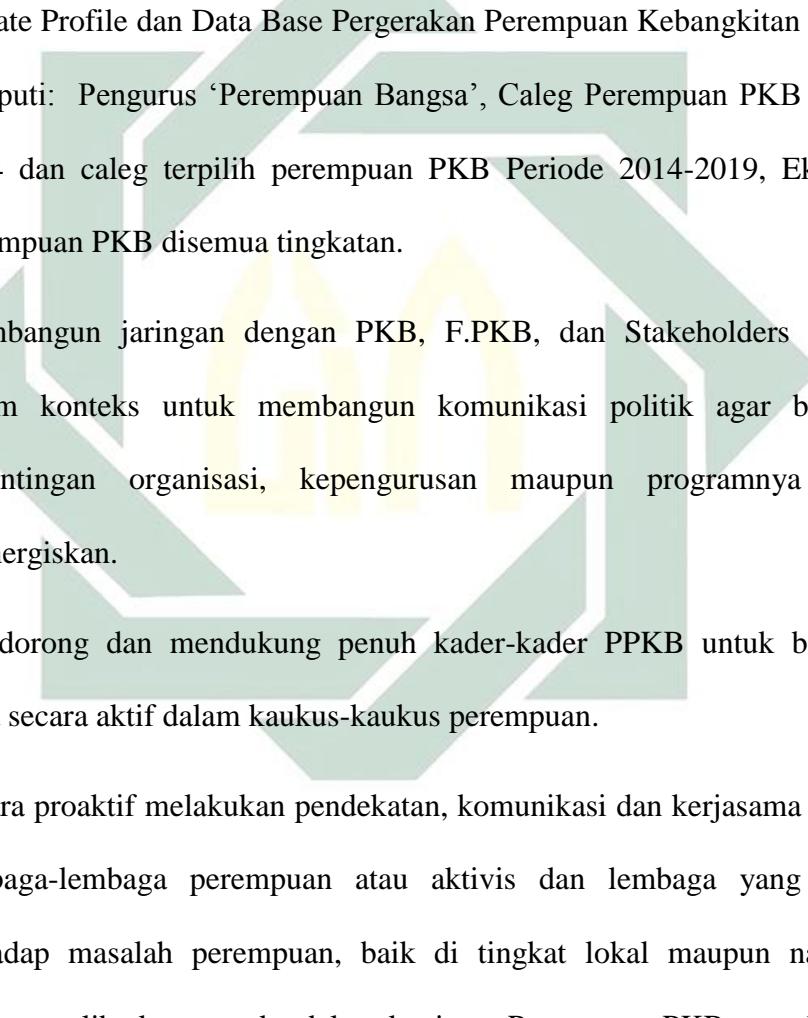
I. Konsolidasi Organisasi

Konsolidasi organisasi merupakan ruh bagi keberadaan PKB sebagai anak kandung reformasi yang dalam catatan sejarah terlibat dalam percaturan perpolitikan Indonsia sejak tahun 1998 sampai memasuki Pemilu 2014-2019.

Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan (organisasi), kepengurusan, militansi kader dan meningkatnya jumlah anggota/simpatisan, maka Perempuan Bangsa perlu merumuskan dan menjalankan program sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembentukan kepengurusan di tingkat Dewan Pengurus Cabang, Dewan pengurus Anak Cabang, Dewan Pengurus Ranting dan Dewan pengurus Anak Ranting.
 2. Memantapkan sistem dan pola rekrutmen kader dan Pengurus yang bersifat rasional, obyektif, dan berorientasi kepada penciptaan efektifitas pengelolaan organisasi dan program pelayanan kepada masyarakat, antara lain penyusunan konsep pendidikan kader Perempuan Bangsa, buku panduan pelaksanaan pendidikan kader Perempuan Bangsa dan melaksanakan pendidikan kader di semua tingkat organisasi Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa.
 3. Mengembangkan dan memantapkan jatidiri PKB sebagai partai terbuka dan modern, dengan indicator; kemandirian, ketersediaan kader dan

akomodasi terhadap lintas ras, golongan, suku dan agama dalam rekrutmen, baik keanggotaan maupun kepengurusan.²⁵

- 
 4. Memantapkan sistem manajemen organisasi yang berorientasi kepada efektifitas pelaksanaan misi Perempuan Bangsa maka kegiatan yang dapat dilakukan antara lain menyusun Pedoman Organisasi;
 5. Update Profile dan Data Base Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa meliputi: Pengurus ‘Perempuan Bangsa’, Caleg Perempuan PKB Pemilu 2014 dan caleg terpilih perempuan PKB Periode 2014-2019, Eksekutif Perempuan PKB disemua tingkatan.
 6. Membangun jaringan dengan PKB, F.PKB, dan Stakeholders lainnya dalam konteks untuk membangun komunikasi politik agar berbagai kepentingan organisasi, kepengurusan maupun programnya dapat disinergiskan.
 7. Mendorong dan mendukung penuh kader-kader PPKB untuk berperan serta secara aktif dalam kaukus-kaukus perempuan.
 8. Secara proaktif melakukan pendekatan, komunikasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga perempuan atau aktivis dan lembaga yang peduli terhadap masalah perempuan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dengan melibatkan mereka dalam kegiatan Perempuan PKB, memberikan asistensi, konsultasi ataupun kerjasama lainnya yang memungkinkan lahirnya sikap simpati terhadap partai.

²⁵ Lily Zakiyah Munir. Memposisikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam Prespektif Islam, hlm. 45 .

J. Konsolidasi Gerakan Advokasi

Beberapa hal yang melatar mengapa Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa meneguhkan diri pada gerakan advokasi, karena beberapa hal: secara umum sistem ketatanegaraan di Indonesia belum dilakukan secara konsisten, adil dan setara. Penegakan hukum (*law enforcement*) masih tebang pilih, ragam kasus hukum yang menjerat penyelenggara negara lamban dituntaskan, sementara sumberdaya alam: tambang minyak, gas, dan hasil bumi lainnya tidak pernah diaudit secara transparan. Terjadi gap distribusi APBN yang prosentasenya lebih banyak antara belanja pegawai daripada untuk pembangunan, serta terjadinya berbagai kebocoran anggaran pembangunan mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih rendah dibanding negara-negara ASEAN:²⁶

Nama Negara	IPM
1. Brunei	0,855
2. Malaysia	0,769
3. Thailand	0,690
4. Indonesia	0,684

Oleh Karena itu sudah waktunya kedepan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa meningkatkan gerakan advokasi dalam arti mendekatkan

²⁶ sumber Pembangunan atau United Nations Development Programme (UNDP) diakses dari www.google.com, 11 /8/2014

kebijakan negara dengan kebutuhan rakyat. Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa harus terlibat dalam pengembangan perspektif hak-hak rakyat (*rights based perspective*) dalam mengkritisi dan partisipasi dalam kebijakan negara dengan pola pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

Secara khusus jika ditelusurui lebih lanjut kondisi obyektif perempuan masih tertinggal di berbagai bidang pembangunan:

1. Bidang Pendidikan

Kondisi obyektif perempuan masih terdapat 6,5 juta penduduk buta aksara, padahal sudah terdapat alokasi dana 20% APBN diperuntukkan untuk pendidikan, sehingga ada program wajib belajar sembilan tahun. Tunjangan diberikan 100% untuk SD dan 95% untuk tingkat SLTP, tunjangan juga diberikan kepada tenaga pendidik, adanya sertifikasi adalah menjadi media untuk penilaian terhadap para pendidik. Namun masih perlu banyak dilakukan evaluasi, mengenai standart kelulusan yang diatur oleh pemerintah yang selama ini dijalankan. Disamping itu, selama ini pendidikan masih dipandang hanya berada dilingkungan formal, beberapa lembaga pendidikan yang bernaung di bawah yayasan “keagamaan” cenderung tidak diakui oleh negara, misal madrasah dan pondok pesantren. Dengan demikian sangat relevan gerakan advokasi ‘Perempuan Bangsa’ dibidang pendidikan diarahkan kepada jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi aktif dalam perjuangan peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pembangunan, sesuai amanat konstitusi, agar anak usia sekolah dapat terpenuhi haknya atas pendidikan.
- b. Mendorong dan memperjuangkan pendidikan akhlak, multikulturalisme dan harmoni social dalam semua jenjang dan jenis pendidikan.
- c. Meneruskan program kajian dan perbaikan terhadap kurikulum pendidikan yang masih bias gender agar bermuatan keberpihakan kepada perempuan secara adil untuk semua jenjang dan jenis pendidikan.
- d. Mendorong dan mesmperjuangkan secara maksimal dan melakukan keberpihakan kepada nasib madrasah dan pondok pesantren, berikut segala hal yang berakitan dengan lembaga tersebut.
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kemampuan dan wawasan para pendidik di semua tingkatan mengenai pendidikan yang berperspektif gender dan anti kekerasan.
- f. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik dan demokratisasi.
- g. Menyelenggarakan pendidikan pelatihan bekerjasama dengan LSM dan penegak hukum untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.
- h. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai media, seperti media cetak, leaflet, brosur, spanduk, media

elektronik, forum-forum rakyat dan berbagai perkumpulan di masyarakat.

- i. Memfasilitasi forum yang diperlukan oleh kalangan pelajar dan remaja putri, pemudi, mahasiswi, kelompok hobi, paguyuban kesenian, dan sebagainya dengan membuat kegiatan seperti bakti sosial, pertandingan olah raga, pentas seni, diskusi, pameran kerajinan rakyat dan sebagainya yang disesuaikan dengan potensi daerah,
 - j. Membuka biro konsultasi dan pelayanan pendidikan misalnya membuka Bimbingan Belajar tes masuk UMPT.

2. Bidang Kesehatan

Secara obyektif angka kematian Ibu (AKI) masih berkisar pada angka 259 per 100.000 kelahiran hidup sementara target MDG's 2015 , AKI harus turun menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian pada bulan Januari sampai dengan Maret 2014 jumlah infeksi HIV/AIDS yang terdapat data baru sebanyak 6.626 kasus. Dengan rasio antara laki-laki dan perempuan 1:1, menurut Badan Narkotika Nasional kasus pengguna Narkoba dengan segala tingkat risikonya mencapai 4,2 juta pengguna maka kondisi ini memerlukan pendampingan dengan ragam bentuk pendekatan. Secara realistik hal-hal yang memungkinkan dapat dilakukan dalam kegiatan aksi antara lain:

- a. Mengadvokasi dari segi regulasi agar percepatan penanganan Kesehatan Ibu dan Anak mendapat perhatian.

- b. Turut aktif dalam proses komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) akan bahaya Narkoba, dan HIV/AIDS
 - c. Membuka biro konsultasi dan pelayanan masalah kesehatan.

3. Bidang Ekonomi

Secara obyektif masih terdapat 9 juta penduduk perempuan sebagai kepala keluarga rendah terhadap akses ekonomi. Terhadap sumber-sumber pangan dan pengolahan berbasis kearifan local dengan adanya UU pangan nampaknya perempuan belum mendapat akses yang mudah untuk perizinan dan pelabelan hasil produksi berbasis pangan local. Banyaknya impor bahan pangan mengakibatkan semakin harga bahan pangan yang tak terkendali, dan hal ini akan mengancam kedaulatan pangan dan ekonomi di masyarakat kita. Sementara Kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Disamping itu era sekarang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi penyumbang terbesar peningkatan PDB (produk domestik bruto) di Indonesia, sehingga negara terhindar dari krisis. Oleh karena itu “Perempuan Bangsa’ perlu melakukan gerakan advokasi sebagai berikut:

- a. Mendorong dan mengupayakan terciptanya iklim yang sehat bagi terbukanya akses perempuan dan perlindungan dalam produktivitas pangan.

- b. Mendorong pengembangan “ekonomi kreatif” berbasis sumberdaya lokal untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
 - c. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi; perbankan, lembaga keuangan non bank, koperasi dan LSM, untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - d. Mendorong dan menumbuhkan potensi kewirausahaan dalam negeri, untuk menumbuhkembangkan wirausahawan yang profesional dalam menghadapi era globalisasi.
 - e. Mendorong penyusunan kebijakan yang berorientasi kepada keberpihakan terhadap sector UKM, dengan aturan yang jelas dan sesuai kondisi daerah.
 - f. Mendorong terciptanya kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pengembangan industri padat karya.
 - g. Mendorong pembuatan kebijakan pembinaan dan perlindungan terhadap tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri.
 - h. Membuka biro konsultasi dan layanan Usaha Ekonomi , missal tata cara membentuk koperasi.

4. Bidang politik

Sebenarnya pada Periode 2014 terdapat progress dari segi regulasi maupun aksi terhadap tuntutan affirmative 30% bagi keterwakilan perempuan sebagaimana amanat UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No.8 Tahun 2012 tentang pemilu DRR,DPD dan

DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota. Namun demikian telah terjadi distorsi idealisme antara pemberian regulasi kuota perempuan dengan prerolehan suara dengan sistem proporsional terbuka. Meskipun secara nasional jumlah anggota Parlemen Perempuan meningkat periode 2004 - 2009, jumlah anggotanya sebanyak 550 orang, dengan jumlah anggota perempuan hanya 11,09 persen atau 61 orang. Periode 2009 - 2014 total jumlah anggota DPR sebanyak 560, jumlah anggota perempuan meningkat menjadi 101 orang atau 18,04 persen akan tetapi perlu revisi kebijakan yang berpihak pada penguatan partisipasi politik perempuan. Kemudian munculnya kebijakan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 juga menjadi refleksi dan aksi Perempuan Bangsa bagaimana menyiapkan secara struktur, sumberdaya maupun infrastruktur lainnya. Mengawali perubahan kebijakan dan perbaikan sistem agar keterwakilan perempuan di Parlemen semakin meningkat secara proporsional. Maka kegiatan yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Melalui PKB dan Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong penataan kembali peraturan perundangan (*law reform*), khususnya peraturan perundangan yang tidak pro rakyat dan bias gender serta berpotensi untuk timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan, serta berperan serta dalam pembahasan rancangan peraturan perundangan, agar lebih pro rakyat dan tidak bias gender serta tidak berpotensi untuk timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan.

- b. Mendorong, mendukung dan mengupayakan tampilnya perempuan, utamanya kader perempuan PKB ,di berbagai Pimilu Kepala Daerah
- c. Mendorong keterpilihan perempuan sebagai anggota Badan Musyawarah Desa sebagaimana amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 58.
- d. Melakukan pendidikan politik rakyat akar rumput khusus perempuan. Ini dilakukan antara lain dengan cara memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dan memanfaatkan para pendamping sebagai organisir.
- e. Mendorong, mendukung dan menyiapkan kader-kader dan simpatisan partai, khususnya perempuan yang memiliki kualifikasi professional dan kompetensi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dan birokrasi pemerintah daerah.
- f. Meningkatkan kapasitas kader dan simpatisan partai, khususnya perempuan untuk menyoongsong Pemilu serentak 2019.

5. Bidang Hukum

Kondisi obyektif kekinian secara umum masyarakat masih jauh akan melek hukum, Persoalan agraria yang mencuat kepermukaan akhir-akhir ini, merupakan implikasi dari orientasi ekonomi dan kebijakan agraria di masa lalu. Persoalan ini berurat akar pada masa yang panjang sejak kolonial, orde baru dan hingga kini. Warisan kebijakan tersebut ternyata makin membuat ketimpangan penguasaan agraria hingga menyebabkan

konflik yang terus bergulir di tengah masyarakat. secara spesifik masalah hukum yang menimpas perempuan yaitu penanganan kasus kekerasan berbasis gender manakala tidak saja terkait dengan persoalan hukum, namun juga terkait dengan persoalan sosial dan budaya setempat di tempat kejadian kekerasan terjadi kerap sangat mempengaruhi penanganan kasus. Sehingga kerap terjadi korban kekerasan berbasis gender sulit mencari keadilan baik pidana maupun perdata. Melihat sekilas berbagai kondisi hukum terutama yang terkait dengan perempuan maka Perempuan Bangsa dapat melakukan kegiatans sebagai berikut:

- a. Membuka pelayanan dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan pada setiap Wilayah dan atau Cabang yang memungkinkan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum, LSM dan perguruan tinggi.
- b. Advokasi dan pemberdayaan warga sesuai dengan jenis masalah, tingkat dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh warga. Program ini sangat mengedepankan pendekatan mikro, baik dari segmentasi sasaran maupun masalah yang dihadapi.
- c. Mendorong penyesuaian berbagai peraturan perundungan yang berkaitan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- d. Membuka biro konsultasi dan pelayanan hukum seperti: konsultasi perburuhan, biro jodoh, ketenagakerjaan, dll.

6. Bidang Sosial-Budaya

Kondisi obyektif mengenai sosial budaya yang berkaitan dengan masalah perempuan yaitu masih adanya diskriminasi terhadap perempuan baik yang terjadi di ranah public maupun di ranah domistik. Data Komnas Perempuan terdapat 119.107 kasus KDRT, sedang kasus anak-anak yang mengalami kekerasan mencapai 3.145. Sementara sudah ada UU No.24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan telah ada UU.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Namun kenyataanya masih banyak perempuan mengalami dikriminasi. Dengan demikian Perempuan Bangsa dapat melakukan program advokasi dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan dari segi pencegahan dengan cara edukasi, penyuluhan agama, dll. Dari segi penanggulangan maka bisa melalui bantuan hukum, pendampingan, dll.
 - b. Menyelenggarakan konsultasi bantuan hukum melalui media massa.

7. Bidang Lingkungan Hidup

Kondisi obyektif saat ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi 257 juta penduduk dan berbagai kebutuhan hidup sandang, papan, dan pangan kian meningkat pula permasalahan lingkungan hidup. Perilaku konsumsi, pola produksi, dan distribusi sumber daya alam antar negara selalu berubah, sedangkan kualitas dan kuantitas lingkungan

sebagai penyangga kehidupan manusia juga cenderung menurun terutama cadangan pangan, energi, dan air. Oleh karena itu orientasi kebijakan mengendalikan dinamika perilaku konsumsi, produksi, dan distribusi sumber daya alam harus diperhatikan dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan aksi. Berangkat dari kondisi tersebut maka PKB yang telah mendeklarasikan sebagai ‘Green Party’ maka gerakannya akan diikuti oleh ‘Perempuan Bangsa’ antara lain :

- a. Mendorong berbagai regulasi baik berupa UU maupun Perda yang melarang eksploitasi sumberdaya alam, sementara masyarakat lingkungan yang dekat dengan sumberdaya alam seperti mayarakat hutan, masyarakat tambang masih jauh dari berkecukupan
 - b. Gerakan pelestarian lingkungan guna memulihkan kembali spesies hayati yang nyaris punah guna keseimbangan ekosistem.
 - c. Gerakan budaya bersih, green building, green house dan *back to nature*

8. Bidang Media dan Jaringan

Media massa yang sebenarnya adalah sarana informasi yang layak, memadai, jujur dan adil, pada kenyataannya masih banyak bentuk-bentuk penyampaian dan peliputan melalui media yang bias gender dan masih menggunakan perempuan sebagai objek seksual dan pomografi. Karena itu diperlukan upaya keras dan serius untuk menghapus budaya eksplorasi (tindak kekerasan) terhadap perempuan, dengan bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendorong dan berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan peraturan dan perundangan yang menekankan kode etik jurnalisme dan media yang dapat mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
 - b. Memfasilitasi forum-forum pertemuan (diskusi, seminar, lokakarya dan pertemuan ilmiah lainnya) antara komponen media massa, pemerintah dan kelompok aktivis anti kekerasan terhadap perempuan.
 - c. Mendorong media massa elektronik untuk mengalokasikan jam tayang yang memadai dalam upaya sosialisasi gender dan kampanye upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan.
 - d. Membentuk media watch yang berkonsentrasi secara spesifik terhadap kasus-kasus media yang bernuansa atau secara langsung melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan.

9. Bidang Pengembangan dan Penelitian (Litbang)

Penelitian dan Pengembangan; dimaksudkan untuk : pertama, telaah terhadap kondisi lapangan, sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan organisasi; kedua adalah dalam rangka penciptaan wacana publik, penciptaan opini, maupun respon solutif atas masalah yang sedang berkembang, antara lain:

- a. Pemetaan masalah riil perempuan pada tingkat mikro sebagai referensi atau acuan dalam penyusunan kegiatan pelayanan.

- b. Kajian masalah ketatanegaraan (menyangkut produk-produk hukum dan perundangan seperti: UUD, UU, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Perda dan sebagainya) dengan fokus kajian representasi dan peluang partisipasi bagi perempuan (perspektif gender), sebagai bahan untuk memberikan masukan pada setiap proses penyusunan produk-produk tersebut.
 - c. Kajian agama yang menyangkut kedudukan perempuan, nilai-nilai yang dapat menjadi pegangan dan motivasi bagi perempuan; dan berbagai kajian tentang perempuan dari perspektif agama.
 - d. Pembekalan dan peningkatan kapasitas kader dalam kegiatan kajian dan penelitian, melalui diklat, magang, pelibatan dalam kegiatan penelitian dan sebagainya.

10. Bidang Fund Raising

Persoalan sumberdana merupakan organ penting dalam organisasi. Ibarat tubuh tanpa darah fungsinya akan terganggu. Oleh karena itu persoalan sumberdana harus mendapat perhatian secara manejerial. Adapun berbagai kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menyusun konsep dan strategi penggalian dana
 - b. Melakukan mapping sumber pendanaan yang bisa dikerjasamakan baik dalam bentuk profit maupun sosial, semisal mengoptimalkan Koperasi sebagai badan usaha yang dapat mendukung sumber pembiayaan organisasi.

c. Menggali dan mendistribusikan hasil pendanaan secara transparan dan akuntabel.²⁷

²⁷ AD/ART, *Perempuan Bangsa*, hlm, 189